



# Tak Ada Jam Malam

## di Jogja

JOGJA—Gubernur DIY mengeluarkan instruksi yang menyatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlaku di semua kabupaten/kota di DIY.

*Lugas Subarkah, Abdul Hamid Razak, & Catur Dwi Janati  
redaksi@harianjogja.com*

Aturan PPKM yang tertuang di Instruksi Gubernur DIY itu hampir sama dengan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat. (Selengkapnya lihat grafis)

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menegaskan tidak ada jam malam selama aturan diberlakukan. Para pelaku perjalanan di malam hari akan ditoleransi selama memenuhi syarat.

"Tidak ada jam malam. Bioskop dan warung-warung sudah harus tutup. Kalau pengertian jam malam mereka keluar malam

▶ Pemda DIY tidak menjaga perbatasan wilayah.

▶ Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY mengumumkan 355 penambahan kasus positif pada Kamis.

dicekeli (ditangkap), ya enggak. Kalau perjalanan di malam hari selama memenuhi persyaratan tidak masalah," kata Baskara Aji dalam jumpa pers secara daring, Kamis (7/1).

Kendati aktivitas dibatasi, Pemda DIY tidak menjaga perbatasan wilayah baik di setiap kabupaten-kota maupun perbatasan provinsi. Menurutnya, dengan berbagai pembatasan kapasitas dan jam operasional di setiap tempat usaha, pusat perbelanjaan dan destinasi wisata, dengan sendirinya akan mengurangi pergerakan manusia:



▶ Halaman 10

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

# PENGETATAN TERBATAS DI DIY

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengeluarkan Instruksi Gubernur DIY tentang Kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di DIY. Beleid tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut kebijakan pembatasan ketat yang dilakukan Pemerintah Pusat.



### Tak Ada...

"Dengan pemberlakuan ini otomatis pembatasan berlaku di seluruh Jawa dan Bali. Sehingga Jawa Tengah yang pembatasan tentu akan berkurang karena sudah ada pembatasan di daerah masing-masing. Otomatis membatasi pergerakan masyarakat. Tidak perlu dicegah, tapi mereka tidak punya tujuan. Pencegahan di hotel dan destinasi. [Syarat] Antigen dan PCR [polymerase chain reaction] tetap berlaku," ujarnya.

Ia menyadari dengan kebijakan ini pasti ada beberapa sektor ekonomi terdampak khususnya pariwisata. "Ini semata-mata dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid, sehingga kalau dilakukan selama dua pekan, mari kita prihatin, tapi berharap setelah dua pekan ada penurunan Covid signifikan, setelah itu bisa melaju lebih kencang," katanya.

Pemda DIY juga menekankan kearifan lokal masyarakat DIY dalam mencegah penularan Covid-19 seperti pada masa awal pandemi, yakni dengan memantau pendatang dan memastikan protokol kesehatan diterapkan di tingkat kecamatan, seperti RT dan RW.

Sekda mempersilakan jika masyarakat membatasi pergerakan di tingkat kampung dengan menggunakan portal, asal tidak menutup satu wilayah. "Tidak boleh tutup satu wilayah secara penuh. Misal pintu masuk kampung ada tiga, yang dibuka satu untuk mengawasi pendatang, silakan," katanya.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yuliana, mengusulkan agar pembatasan ini diikuti *screening* massal di terpadat-tempat berisiko tinggi. *Screening* massal ini mesti dirancang baik secara metodologi sehingga bisa efektif memotret dan dilakukan tindakan pencegahan penularan.

"*Screening* ini kami usulkan kerja sama dengan UGM menggunakan alat GeNose teman UGM yang sudah siap. Kita pinjam dulu alat yang sudah ada dan *ready* selama dua pekan atau sebulan sekaligus membuat *pilot project screening* massal di wilayah DIY menggunakan metodologi yang baik," ujarnya.

Warga yang diminta isolasi mandiri, kata dia, jika memerlukan bantuan perlu dilakukan dengan mengaktifkan sistem sosial antarwarga atau *gotong royong*. Harapannya pembatasan aktivitas yang diikuti *screening* massal akan menurunkan kasus penularan Covid-19 signifikan.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, menjelaskan PPKM bukan pelarangan kegiatan masyarakat.

"Masyarakat jangan panik. Ini bukan menghentikan seluruh kegiatan, jadi kegiatan sektor esensial, baik pangan, energi, perhotelan, bisa berjalan," ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan, PPKM bukan menyepot seluruh aktivitas. Kegiatan tertentu tetap bisa berjalan. Ketua Umum

Partai Golkar itu menyebut pembatasan ini bukan berarti *lockdown*. Kebijakan ini diambil pemerintah agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid pascalibur Natal dan Tahun Baru. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu meminta masyarakat terus disiplin mematuhi protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

### Aturan Lama

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, menyatakan masih mengacu kebijakan sebelumnya karena belum ada aturan baru. "Sampai dengan saat ini PHRI juga belum jelas, karena hanya tempat kerja yang tertulis [di Instruksi Gubernur]. Kami menunggu arahan Dinas Pariwisata DIY, sementara ini kami tetap mengacu kapasitas 60 persen untuk hotel [okupansi kamar dan MICE]," ucap Ketua PHRI DIY, Dedy Pranowo Eryono.

Sementara itu untuk resto, PHRI akan mengikuti aturan yang baru. "Kami akan sosialisasikan ke anggota nanti, dan mengingatkan kembali untuk lebih disiplin dalam penerapan protokol kesehatan," ucap Dedy.

Pemkab Sleman siap menerapkan kebijakan PPKM dan akan membuka posko khusus. Sekda Sleman Harda Kiswaya mengatakan posko khusus tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mengakses segala hal yang berkaitan dengan PPKM. Keberadaan posko akan dikoordinasi oleh Satpol PP dengan melibatkan dinas kesehatan, TNI, dan Polri. "Kami ingin target penerapan PPKM untuk menekan angka kasus Covid-19 dapat tercapai," kata Harda.

Selama PPKM, katanya, razia kepatuhan protokol kesehatan akan ditingkatkan. Namun Pemkab tidak akan memberlakukan denda bagi pelanggaran. "Kami lebih mengedepankan kearifan lokal. Masyarakat diberitahu agar disiplin protokol kesehatan," katanya.

Disingung soal kebijakan pembatasan di destinasi dan usaha jasa pariwisata, Harda mengatakan Pemkab tidak menutup total operasional destinasi dan usaha jasa pariwisata.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogja, Heroe Poerwadi, mengaku sedang menyamakan persepsi dengan daerah lain. "Pusat aktivitasnya kan ada di Kota Jogja. Jadi apapun yang akan diputuskan nanti kan kota sebagai salah satu pusat aktivitas dan Ibu Kota provinsi memang harus sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Bantul Agus Budiharja mengatakan sebelum keluar untuk melakukan PPKM, sejarahnya Bantul telah membuat rancangan pembatasan. Hal ini ditunjukkan dengan telah diulesainya

kebijakan WFH untuk instansi swasta dan pemerintah dengan persentase 50:50. Selain itu, juga ada toko modern yang dibatasi maksimal pukul 21.00 WIB, pembatasan tempat ibadah 50% dari kapasitas, dan penundaan kegiatan pelibatan massa. "Kami juga telah siapkan antisipasi lonjakan kasus. Di antaranya dengan penambahan tempat tidur, rumah sakit rujukan dan selter. Harapannya ini linier dengan adanya pembatasan," ujar Agus.

Adapun, Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Dewi Irwaty, mengatakan Pemkab sudah melakukan koordinasi internal terkait dengan pelaksanaan pembatasan aktivitas di masyarakat. Hanya saja, untuk teknisnya masih menunggu instruksi resmi dari Pemerintah DIY karena sesuai arahan dari pusat ada akan ada kebijakan lanjutan tentang pelaksanaan di lapangan.

Wakil Bupati Kulonprogo yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kulonprogo, Fajar Gegana mengatakan secara umum aturan di DIY sama dengan yang diinstruksikan Pusat.

### Pecah Rekor

Sementara itu, kasus positif harian DIY kembali pecah rekor. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY mengumumkan 355 penambahan kasus positif pada Kamis. Kota Jogja dan Bantul mendominasi penambahan. Sebanyak 131 kasus dinyatakan sembuh dan empat kasus dilaporkan meninggal dunia.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih, menjelaskan berdasarkan domisili, penambahan kasus meliputi Kota Jogja (101 kasus), Bantul (106 kasus), Kulonprogo (25 kasus), Gunungkidul (30 kasus), dan Sleman (93 kasus).

Dilihat dari riwayatnya, penambahan kasus terdiri dari *tracing* kasus positif (229 kasus), periksa mandiri (56 kasus), dan belum ada keterangan 70 kasus. "Empat kasus meninggal meliputi Kasus 13.086, perempuan, 45, warga Bantul; Kasus 13.316, perempuan, 67, warga Sleman; Kasus 13.544, perempuan, 67, warga Gunungkidul; dan Kasus 13.613, perempuan, 48, warga Sleman," katanya.

Adapun kasus sembuh berdasarkan domisili meliputi Kota Jogja (55 kasus), Bantul (81 kasus), Gunungkidul (22 kasus), dan Sleman (23 kasus). Dengan penambahan ini, maka total kasus positif DIY menjadi sebanyak 13.967 kasus. Rincian total kasus positif meliputi 4.293 kasus aktif, 9.373 kasus sembuh, dan 301 kasus meninggal. Sementara penggunaan bed di rumah sakit rujukan untuk kritikal sebanyak 57 bed, sisa 19 bed. Untuk nonkritikal digunakan 595 bed, sisa 46 bed. (Jurnal/Harianbang Jati Kusuma/David Nurriswan/Suaras)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 28 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005